



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEKDIKTI, DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 8 Juni 2015</b>
Waktu	: <b>Pukul 19.15 - 20.36 WIB</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Ir. Nuroji / Wakil Ketua Komisi X DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos./ Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	: 1. Menerima masukan dari Kwarnas Gerakan Pramuka; dan 2. Lain-lain.
Hadir	: a. 39 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI. b. Ketua Umum Kwarnas Gerakan Pramuka, beserta jajarannya

**I. PENDAHULUAN**

Setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, Ketua Komisi X DPR RI/ Ir. Nuroji, membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka pada pukul 19.15 WIB.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. CATATAN RAPAT**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Kwarnas Gerakan Pramuka tentang program-program Kwarnas Gerakan Pramuka khususnya mengenai persiapan Jambore Dunia 2015 di Jepang, Jambore Nasional Tahun 2016, dan Raimuna Tahun 2017.
2. Kwarnas Gerakan Pramuka menyampaikan saran, usulan dan permasalahan Kwarnas Gerakan Pramuka antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk lebih mengembangkan Gerakan Pramuka, Kwarnas Gerakan Pramuka mengharapkan agar Kwarnas Gerakan Pramuka berada di bawah Kemendikbud RI, karena Gerakan Pramuka lebih kepada fungsi pendidikan.
  - b. UU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka perlu dilakukan revisi (usulan revisi terlampir).
  - c. Anggaran sejumlah Rp. 96.000.000.000 (*sembilan puluh enam milyar*) yang dialokasikan untuk Renovasi Buperta Cibubur untuk Persiapan Jambore serta Raimuna yang ada di pagu APBN-P TA 2015 Kemenpora RI sampai saat ini belum dapat dicairkan oleh Kemenpora RI. Hal ini dikarenakan Kemenpora RI memberikan syarat agar lahan BUPERTA yang akan direnovasi seluas 210 Hektar dialihkan statusnya/tercatat sebagai BMN (Barang Milik Negara) milik Kemenpora RI, sementara sikap Kwarnas Gerakan Pramuka dengan tegas menolaknya.
  - d. Kwarnas Gerakan Pramuka mengajukan usulan anggaran untuk kebutuhan sarana kegiatan Jambore Nasional Tahun 2016 sebesar Rp. 43.430.000.000,- (*empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah*) agar dialokasikan pada APBN TA 2016.
3. Terhadap usulan dan permasalahan Kwarnas Gerakan Pramuka sebagaimana angka 2 diatas, Komisi X DPR RI:
- a. Terkait pencairan anggaran sejumlah 96 M akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menpora RI
  - b. Terkait dengan usulan Kwarnas, Gerakan Pramuka dapat dibawah Kemendikbud RI dan Kemenpora RI sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas dan UU No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, atau sepenuhnya berada di Kemendikbud RI.
  - c. Terhadap usulan Revisi UU No 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Komisi X DPR RI meminta Kwarnas Gerakan Pramuka untuk menyampaikan usulan pada tahun 2015 agar dapat dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2016

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.36 WIB.

KETUA,



Ir. NUROJI 1